

Analisa Determinasi TPAK di Jawa Tahun 2015-2019

Amirull Dwi Hasti¹, Rian Destiningsih^{*1}

^{1,2}Universitas Tidar, Magelang, 56116, Indonesia

*Email korespondensi: riandestiningsih@untidar.ac.id²

Diterima 22 Februari 2022; Disetujui 26 Maret 2022; Dipublikasi 6 April 2022

Abstract: *Development is a continuous process that aims to improve the welfare of the people in an area. The economic development of a region cannot be separated from the human resources in that area. Human resources or residents in an area will act as labor, input from development or production factors, as well as the final consumer of production. This study is to see how the influence of the independent variables consisting of education, regional minimum wages, and the ratio of dependence on TPAK in the Java region in 2015-2019. The data used is secondary data with a panel of 6 provinces in Java in 2015-2019 with regression analysis by Eviews 10. The results of this study are that education and the dependency ratio have a significant positive effect, and the regional minimum wage has a negative and insignificant effect with the TPAK in the Java Region in 2015-2019. For this reason, the government is advised to determine the amount of regional minimum wages in order to realize people's welfare, it is better to pay attention to several things, namely seeing the needs of a decent life, the level of education of workers, and the number of the workforce.*

Keywords: *Education, Wage, Dependency Ratio, Partisipan of Workforce.*

Abstrak: Pembangunan merupakan sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu daerah. Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak akan lepas dari SDM di daerah tersebut. Sumber daya manusia atau penduduk di suatu daerah akan berperan sebagai tenaga kerja, input dari pembangunan atau faktor produksi, dan juga konsumen akhir dari hasil produksi. Penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh dari variable independen yang terdiri atas Pendidikan, Upah Minimum Regional, dan Rasio Ketergantungan terhadap TPAK di Daerah Jawa pada tahun 2015-2019. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan panel 6 provinsi di Jawa tahun 2015-2019. Dengan analisis regresi menggunakan Eviews 10. Diperoleh hasil bahwa pendidikan dan rasio ketergantungan memiliki pengaruh positif yang signifikan, serta upah minimum regional memiliki pengaruh negative yang tidak signifikan dengan TPAK di Daerah Jawa tahun 2015-2019. Untuk itu pemerintah disarankan dalam menentukan tingkat upah minimum regional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal yaitu melihat kebutuhan hidup layak, tingkat pendidikan tenaga kerja, dan jumlah angkatan kerja yang ada.

Kata kunci : Pendidikan, UMR, Rasio Ketergantungan, TPAK

Pembangunan merupakan sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu daerah (Menajang, 2019; Saputri & Destiningsih, 2020).

Yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan disuatu daerah dapat dikatakan berhasil adalah ketika pertumbuhan ekonomi dan perekonomian yang tinggi serta terus menurunnya tingkat kesenjangan

pendapatan yang ada dimasyarakat baik itu antar penduduk, antar daerah, maupun antar sector yang ada. Menurut Todaro (2000:20) Dalam usaha pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya yaitu harus menghilangkan ataupun mengurangi kesenjangan pendapatan, tingkat pengangguran, dan yang paling utama adalah mengurangi kemiskinan. Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak akan lepas dari SDM di daerah tersebut. Dalam teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith menyebutkan bahwa yang menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di suatu daerah ataupun negara adalah SDM yang ada di daerah maupun wilayah tersebut. Dengan begitu negara yang berjumlah penduduk tinggi akan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. Sumber daya manusia atau penduduk di suatu daerah akan berperan sebagai tenaga kerja, input dari pembangunan atau factor produks , dan juga konsumen akhir dari hasil produksi.

Pembangunan merupakan sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu daerah. Yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan disuatu daerah dapat dikatakan berhasil adalah ketika pertumbuhan ekonomi dan perekonomian yang tinggi serta terus menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan yang ada dimasyarakat baik itu antar penduduk, antar daerah, maupun antar sector yang ada. Menurut Todaro (2000:20) Dalam usaha pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya yaitu harus menghilangkan

ataupun mengurangi kesenjangan pendapatan, tingkat pengangguran, dan yang paling utama adalah mengurangi kemiskinan. Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak akan lepas dari SDM di daerah tersebut. Dalam teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith menyebutkan bahwa yang menjadi factor utama dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di suatu daerah ataupun negara adalah SDM yang ada di daerah maupun wilayah tersebut. Dengan begitu negara yang berjumlah penduduk tinggi akan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. Sumber daya manusia atau penduduk di suatu daerah akan berperan sebagai tenaga kerja, input dari pembangunan atau factor produks , dan juga konsumen akhir dari hasil produksi.

UU RI Nomer 13 Tahun 2003 yang membahas mengenai ketenagakerjaan menyebutkan bahwa yang memiliki hubungan dengan tenaga kerja bukan hanya selama masa kerja akan tetap masa sebelum dan sesudah juga termasuk dalam ketenagakerjaan. Seseorang yang mampu melangsungkan suatu pekerjaan guna memproduksi barang ataupun jasa maka akan disebut dengan tenaga kerja. Simanjuntak mendefinisikan yang menjadi pembeda antara tenaga kerja dan bukan tenaga kerja ialah batasan usia dari penduduk. Yang termasuk dalam kelompok tenaga kerja menurut UU Yang dimaksud dengan tenaga kerja ialah mereka yang berada pada usia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sedangkan Kelompok bukan tenaga kerja ya itu mereka yang berada dalam usia bawah 15 tahun dan mereka yang berada dalam usia lebih dari 64 tahun (Adianto & Fedryansyah, 2018).

BPS telah membagi penduduk yang memasuk usia kerja menjadi 2 yaitu penduduk dengan usia kerja yang sedang bekerja atau dapat disebut dengan angkatan kerja dan juga penduduk yang memasuk usia kerja akan tetap belum bekerja atau yang disebut dengan penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja. Penduduk yang berada dalam usia kerja yang bekerja maupun untuk sementara sedang tidak bekerja atau menganggur merupakan penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja, sedangkan penduduk yang berada dalam usia kerja akan tetapi ia masih sekolah atau mungkin mengurus rumah tangga, ataupun sedang melakukan kegiatan lain yang tidak menghasilkan secara finansial itu disebut dengan penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja.

Pulau dengan jumlah penduduk terbanyak atau bisa disebut juga memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi Indonesia adalah Pulau Jawa yaitu sekitar kurang lebih 145 juta jiwa. Dapat dikatakan bahwa Pulau Jawa mempunyai jumlah angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau bisa disebut TPAK biasanya digunakan untuk membandingkan banyaknya penduduk yang menjadi angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang berada dalam usia siap kerja. Dengan kata lain semua daerah atau negara menginginkan tingginya TPAK karena dengan TPAK yang tinggi ini berarti partisipasi angkatan kerja semakin tinggi dan jumlah pengangguran menurun. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau bisa disebut TPAK merupakan persentase penduduk yang berada pada usia kerja (yaitu 15 tahun ke atas) yang merupakan angkatan kerja. Dengan asumsi

ketika TPAK suatu daerah tinggi maka cadangan akan tenaga kerja di daerah atau negara tersebut juga akan mengalami peningkatan itu artinya tenaga kerja yang tersedia guna memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di daerah atau negara tersebut juga tinggi hal ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang semakin tinggi pula.

Tabel 1. TPAK di Jawa pada tahun 2015-2019(%)

Provinsi	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	66.39	66.91	61.97	63.95	64.81
Jawa Barat	60.34	60.65	63.34	62.84	64.99
Jawa Tengah	67.86	69.11	68.56	68.62	69.43
DI Yogyakarta	63.38	71.96	71.52	73.37	72.94
Jawa Timur	65.76	66.14	68.78	69.37	69.45
Banten	63.84	63.66	62.32	63.49	64.52

Sumber : BPS Tahun 2015-2019 (diolah)

Untuk melihat perkembangan perekonomian di suatu daerah terdapat salah satu indikator yang sangat penting yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau dapat disingkat dengan TPAK, karena dengan TPAK ini dapat melihat seberapa banyak tingkat ketersediaan tenaga kerja, hal ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan yang baik dan tepat sasaran khususnya di dalam bidang ketenagakerjaan baik di tingkat daerah maupun di tingkat negara. Dari Tabel di atas dapat dilihat besaran nilai TPAK Provinsi yang terdapat di Daerah Jawa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terlihat di masing-masing provinsi tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan pada tahun 2015 provinsi dengan nilai tingkat partisipasi angkatan kerja paling tinggi yaitu Jawa Tengah yaitu 67,86% dan provinsi dengan nilai tingkat partisipasi

angkatan kerja terendah yaitu Jawa Barat yaitu sebesar 60,34%. Pada tahun 2019 provinsi dengan nilai tingkat partisipasi angkatan kerja paling tinggi yaitu DI Yogyakarta sebesar 72,94% dan provinsi dengan nilai TPAK paling rendah ialah Banten yaitu sebesar 64,52%.

Menurut (Dr Hasrudin Tanjung, 2015) suatu target kerja yang optimal akan dihasilkan oleh tenaga kerja yang berkualitas tinggi. (Hidayat et al., 2017) melakukan penelitian terkait hubungan antara variabel pendidikan dan TPAK antar Kabupaten di Riau, dari penelitian itu membuktikan bahwa variabel pendidikan mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap variabel TPAK. Melek Huruf merupakan suatu indicator tingkat pendidikan yang sangat penting dan mendasar karena dalam suatu proses belajar dan mengajar kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis menjadi titik awalnya. Untuk melihat seberapa jauh penduduk dari suatu daerah atau negara terbuka akan hal baru, ilmu pengetahuan, dan teknologi dapat terlihat dari semakin tingginya Angka Melek Huruf (AMH) dari suatu wilayah atau negara tersebut. AMH melihat berapa banyak penduduk usia 15 tahun ke atas di suatu daerah atau negara dapat membaca dan menulis

Tabel 2 Pendidikan (Angka Melek Huruf) di Jawa Pada tahun 2015-2019 (%)

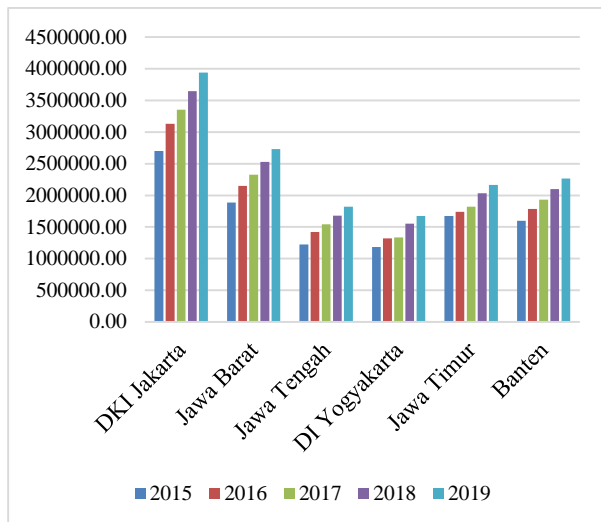
Provinsi	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	99.59	99.64	99.67	99.72	99.74
Jawa Barat	98.01	98.22	98.23	98.48	98.53
Jawa Tengah	93.12	93.30	93.39	93.45	93.54
DI Yogyakarta	94.50	94.59	94.64	94.83	94.96
Jawa Timur	91.47	91.59	91.82	91.85	92.32
Banten	97.37	97.55	97.57	97.62	97.62

Sumber : BPS tahun 2015-2019 (diolah)

Tingginya tingkat Melek Huruf ini

menunjukkan adanya keberhasilan program keaksaraan yang dilakukan pemerintah ataupun membuktikan bahwa adanya keefektifan dana pendidikan dengan begitu penduduk akan mendapatkan kemampuan membaca dan menulis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dari Berdasarkan tabel 2 memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki Angka Melek Huruf Terendah (AMH) terendah di tiap tahunnya pada saat tahun 2015 sebesar 91,50% dan pada saat tahun 2019 sebesar 92,32%. Sedangkan provinsi dengan AMH tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu pada saat tahun 2015 sebesar 99,56% dan pada saat tahun 2019 sebesar 99,74%.

Berdasarkan penelitian yang dituliskan oleh (Sarsi et al., 2014) menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara upah dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Begitu pula yang diungkap oleh (Yulianti, 2018) membuktikan bahwasannya variabel upah mempunyai hubungan negative yang signifikan terhadap penawaran tenaga kerja. Upah Minimum Regional (UMR), upah merupakan suatu gaji berupa uang sebagai bentuk tanda jasa yang diberikan untuk pekerjaan yang sudah pekerja lakukan biasanya upah disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas dari pekerjaan yang dilakukan pekerja. Yang dimaksud dengan upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (paling rendah) yang digunakan sebagai tanda jasa yang diberikan untuk pekerjaan yang telah pekerja lakukan dari perusahaan atau pengusaha tempat mereka bekerja. Upah Minimum Regional (UMR) merupakan gaji ataupun imbalan minimum yang diberlakukan di suatu wilayah yaitu wilayah provinsi ataupun wilayah kabupaten/kota.



Gambar 1. UMR di Jawa pada tahun 2015-2019 (Rp)
Sumber : BPS tahun 2015-2019 (diolah)

Berdasarkan gambar 1 memperlihatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta mempunyai upah paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Daerah Jawa, pada saat tahun 2015 sebesar Rp 2.700.000,00 dan pada saat tahun 2019 sebesar Rp 3.940.973,00. Sedangkan provinsi dengan upah yang paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Daerah Jawa ialah Provinsi DI Yogyakarta pada saat tahun 2015 sebesar Rp 1.182.510,00 dan pada saat tahun 2019 sebesar Rp 1.676.280,00. Meski demikian upah seluruh provinsi di Daerah Jawa terus mengalami kenaikan pada tahun 2015-2019.

Selanjutnya adalah rasio ketergantungan (dependency ratio), rasio ketergantungan ini digunakan sebagai indikator dalam melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dengan memperlihatkan perbandingan antara penduduk yang masuk pada usia produktif dengan penduduk yang berada dalam usia tidak produktif. Jumlah tanggungan keluarga akan mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap TPAK (Purwanti & Rohayati, 2014). Perbandingan

antara jumlah penduduk yang termasuk pada usia non-produktif yaitu kurang dari umur 15 tahun dan lebih dari umur 64 tahun dengan jumlah penduduk yang masuk pada usia produktif yaitu antara umur 15 sampai dengan umur 64 tahun dapat di gambarkan dengan rasio ketergantungan atau dependency rasio.

Tabel 3 Angka Rasio Ketergantungan di Jawa Pada tahun 2015-2019 (%)

Provinsi	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	39.84	40.32	40.75	41.15	41.90
Jawa Barat	47.62	47.30	47.02	46.81	46.67
Jawa Tengah	48.10	47.89	47.69	47.63	47.64
DI Yogyakarta	45.05	45.02	45.02	45.09	45.23
Jawa Timur	44.22	43.97	43.79	43.70	43.68
Banten	46.41	46.14	45.91	45.74	45.59

Sumber : BPS tahun 2015-2019 (diolah)

Apabila persentase dependensi rasio di suatu Daerah tinggi maka dapat di katakan bahwa tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk dengan usia kerja yang produktif guna memenuhi kebutuhan hidup penduduk yang tidak produktif maupun penduduk yang belum produktif akan semakin besar pula, begitu juga sebaliknya. Dari table 1.3 dapat dilihat bahwa provinsi yang mempunyai angka rasio ketergantungan paling tinggi jika disetarakan dengan provinsi lain di Daerah Jawa yaitu Provinsi Jawa tengah pada saat tahun 2015 sebesar 48,10% dan pada saat tahun 2019 sebesar 47,64%. Sedangkan provinsi dengan angka rasio ketergantungan terendah adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu pada tahun 2015 sebesar 39,84% dan pada tahun 2019 sebesar 41,90%.

Berdasarkan penjelasan yang ada di latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh pendidikan (angka

melek huruf) terhadap TPAK di Jawa tahun 2015-2019, pengaruh upah minimum regional (UMR) terhadap TPAK di Jawa tahun 2015-2019, dan pengaruh angka rasio ketergantungan terhadap TPAK di Jawa tahun 2015-2019.

KAJIAN PUSTAKA

Tenaga Kerja

Dalam buku Teori Ekonomi karangan (Ismail, 2018) mengutip berdasarkan Teori Klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith (1729:1790), menyebutkan bahwa teori klasik melihat yang menjadi permulaan dari pertumbuhan ekonomi yaitu distribusi SDM yang efektif, dan sesudah itu pertumbuhan ekonomi akan terjadi dan akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan guna menjaga perekonomian terus mengalami pertumbuhan. Atau dengan kata lain, syarat utama dari pertumbuhan ekonomi adalah distribusi sumber daya manusia yang efektif. Menurut Malthus (1766-1834), untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia akan lebih cepat mengalami perkembangan dibanding dengan produksi hasil pertanian. Manusia ini dapat berkembang sesuai dengan deret ukur, sedangkan produksi makanan hanya akan meningkat sesuai dengan deret hitung.

Akan tetapi, Keynes (1883-1946) kurang setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh paham klasik, karena menurutnya serikat buruh ataupun serikat tenaga kerja akan selalu berusaha untuk terus berjuang akan tinggkat upah yang didapat oleh para tenaga kerja dan buruh yang tergabung didalam organisasi tersebut.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Perbandingan antara banyaknya penduduk yang berada pada usia kerja yang bekerja dengan

penduduk yang berada pada usia kerja yang menjadi angkatan kerja hal inilah yang dimaksud dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau dapat singkat dengan TPAK. Penduduk yang berada pada usia kerja adalah penduduk yang telah berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun yang berpotensi dalam menghasilkan output berupa barang atau jasa. Salah satu indicator dari tingkat PDB di suatu daerah adalah nilai dari TPAK, ketika nilai TPAK tinggi maka dapat diartikan bahwa penduduk yang produktif atau memiliki pekerjaan juga semakin banyak dengan begitu out dari pada perekonomian juga akan semakin tinggi.

Dalam menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat dilakukan dengan rumus berikut ini:

$$TPAK = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Maka ketika tingkat partisipasi angkatan kerja semakin tinggi ini sebagai akibat dari semakin tingginya jumlah penduduk yang menjadi angkatan kerja. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi jumlah penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja, maka akan semakin rendah pula jumlah angkatan kerja, dimana hal ini akan mengakibatkan persentase nilai TPAK menjadi rendah.

Pendidikan

Menurut UU RI Nomer 20 Tahun 2003, terkait dengan pendidikan menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya usaha untuk mengembangkan potensi diri dan kecerdasan saja akan tetap untuk memperkuat kekuatan agama, pengendalian akan diri sendiri, akhlak mulia yang tinggi serta keterampilan yang mungkin akan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat yang berada disekitarnya juga.

Todaro (2014) menurutnya dalam mencapai tujuan pembangunan adalah dengan pendidikan. Pendidikan merupakan factor utama dalam memajukan negara yang sedang berkembang, dengan begitu pada sumber daya manusia akan mampu menyerap teknologi yang kian maju dan menjadi tenaga kerja yang berkualitas tinggi.

Upah Minimum Regional

Sukirno (2015) berpendapat bahwa menurutnya upah yang tertera dalam teori ekonomi, ialah suatu pembayaran ataupun suatu imbalan yang diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk dari balas jasa dan disediakan ataupun diberikan oleh para pengusaha.

Berdasarkan UU RI Nomer 13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, dalam Bab I Pasal 1 Ayat 30, yang berfokus pada upah, Pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah bukan hanya gaji pokok yang dibayarkan perusahaan kepada buruh ataupun tenaga kerja akan tetapi tunjangan untuk pekerja itu sendiri maupun keluarga pekerja juga termasuk dalam upah, upah yang diberikan haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada, perjanjian awal kerja atau kontrak kerja, dan yang paling utama harus sesuai dengan UU yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia system pengupahan diatur dalam UUD Pasal 27 Ayat 2 dengan implementasinya sesuai dengan industrial Pancasila.

Angka Rasio Ketergantungan

Parson bagian dalam Peby Kristiana (2009) menyimpulkan perbandingan antara jumlah penduduk yang berada pada usia kerja dengan jumlah penduduk yang belum masuk dalam

usia produktif dan penduduk yang sudah tidak termasuk dalam usia produktif lagi merupakan hal yang disebut dengan dependensi rasio, di kebanyakan negara berkembang itu jumlah penduduk yang belum produktif atau jumlah anak-anak relative lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang berada pada usia kerja hal ini berarti tingkat dependensi rasio yang dimiliki oleh negara berkembang akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara yang sudah maju. Sedangkan Maxwell di Peby Kristiana (2009) berpendapat bahwa angka yang memperlihatkan populasi penduduk daripada kegiatan produktif yang dilaksanakan penduduk yang berada pada usia kerja itulah yang disebut dengan dependensi rasio. Penduduk yang masuk pada usia produktif ini biasanya penduduk yang berusia 15-65 tahun.

Ida Bagoes Mantra (2000) berpendapat bahwa pembangunan perekonomian di Indonesia yang menjadi salah satu penghambatnya ialah tingginya angka rasio beban tanggungan yang ada, hal demikian dapat terjadi karena sebagian besar pendapatan yang didapatkan penduduk yang masuk di usia produktif akan digunakan untuk membiayai penduduk yang berada di usia belum masuk dalam usia produktif maupun penduduk yang sudah tidak berada dalam usia produktif lagi. Di negara-negara berkembang yang memiliki tingkat fertilitas yang tinggi, maka akan mempunyai angka rasio ketergantungan yang tinggi pula, hal ini disebabkan oleh besarnya jumlah anak-anak dalam suatu kelompok penduduk di masyarakat. Dengan angka rasio ketergantungan penduduk yang semakin rendah, maka dapat dikatakan bahwa semakin baiknya pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah ataupun suatu negara.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan guna memahami literature-literature terdahulu seperti jurnal-jurnal yang sesuai dengan tema daripada penelitian ini. Sedangkan dokumentasi merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tema penelitian ini berdasarkan data yang telah didokumentasikan oleh instansi terkait. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi TPAK, pendidikan, UMR, dan angka rasio ketergantungan. Dengan TPAK sebagai variable dependen, sedangkan pendidikan, UMR, dan angka rasio ketergantungan sebagai variable independen. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka model matematis dari penelitian ini adalah:

$$TPAK = f(PEND, UMR, DR)$$

Keterangan:

TPAK	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
PEND	= Pendidikan
UMR	= Upah Minimum Regional
DR	= Dependency Ratio

Berdasarkan persamaan matematis tersebut, maka dapat ditulis model ekonometrika yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$TPAK = \beta_0 + \beta_1 PENDING_{it} + \beta_2 UMR_{it} + \beta_3 DR_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

TPAK	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
PEND	= Pendidikan
UMR	= Upah Minimum Regional
DR	= Dependency Ratio
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
ϵ_{it}	= Variabel Residual
it	= Data Panel

Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel yang merupakan gabungan data cross section dan time series dari 6 provinsi di Daerah Jawa dari tahun 2015-2019. Untuk mengestimasi persamaan dengan data panel dikenal dengan tiga pendekatan yaitu FEM, CEM, dan REM.

Menurut (Widarjono, 2018) untuk menentukan model mana yang cocok untuk digunakan dalam metode penelitian, dapat melakukan uji-uji sebagai berikut: (1) Uji Hausman digunakan guna menetapkan model mana yang terbaik untuk digunakan antara REM dan FEM. (2) Uji Chow diperlukan guna menetapkan model terbaik yang akan digunakan antara model FEM atau CEM. (3) Uji *Lagrange Multiplier* diperlukan guna menetapkan model terbaik yang akan digunakan antara model CEM atau REM.

Selanjutnya penelitian ini juga akan melakukan uji statistik sebagai berikut: (1) Koefisien Determinasi merupakan uji yang dilakukan untuk menjelaskan seberapa jauh model regresi berpengaruh akan variabel Y. (2) Uji t diperlukan guna melihat bagaimana besaran pengaruh dari tiap-tiap variabel X yang dipakai terhadap variabel Y yang ada caranya dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. (3) Uji F merupakan uji yang dilakukan guna melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara bersama-sama dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel.

Pengukuran Variabel

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup variabel TPAK sebagai variable dependen (Y), serta variabel pendidikan, upah minimum regional, dan

dependency ratio sebagai variabel independen (X1, X2, X3) dari 6 provinsi di Pulau Jawa. Untuk mempermudah pembahasan peneliti membatasi variabel yang digunakan, sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Y), Untuk melihat seberapa jauh kebenaran mengenai penduduk yang sudah masuk pada usia kerja yang benar-benar bekerja secara aktif dan penduduk yang sudah masuk pada usia kerja akan tetapi tidak sedang bekerja yaitu dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang dimiliki oleh suatu daerah. Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja ini dinyatakan dalam satuan persentase (%) serta data yang dipergunakan adalah data enam provinsi di Daerah Jawa dari tahun 2015-2019.
2. Pendidikan (X1), Pendidikan merupakan unsur dalam ilmu pengetahuan, pendidikan dapat ditempuh cara formal maupun tidak formal. Pendidikan tidak formal dapat dilihat salah satunya dengan indikator angka melek huruf. Dimana angka melek huruf sebagai indikator untuk melihat pendidikan dasar penduduk di suatu daerah. Variabel angka melek huruf ini dinyatakan dalam satuan persentase (%) serta data yang dipergunakan adalah data enam provinsi di Daerah Jawa dari tahun 2015-2019.
3. Upah Minimum Regional (X2), Upah minimum regional dibagi menjadi 2 yaitu upah minimum berdasarkan wilayah provinsi dan kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sector pada wilayah provinsi kabupaten/kota (UU RI Nomer 13 Tahun 2003 Pasal 89 ayat 1). Upah merupakan penghasilan yang dihasilkan oleh pekerja/buruh untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak bagi kemanusiaan. Variabel upah minimum regional ini dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp) serta data yang dipergunakan adalah data enam provinsi di Daerah Jawa dari tahun 2015-2019.

4. Angka Rasio Ketergantungan/Dependency Ratio (X3), Angka rasio ketergantungan melihat bagaimana beban penduduk yang berada dalam usia produktif (yaitu umur 15-64 tahun) terhadap penduduk berada para usia belum produktif (yaitu umur 0-14 tahun) dan penduduk berada para usia sudah tidak lagi produktif (diatas umur 65 tahun). Variabel angka rasio ketergantungan ini dinyatakan dalam satuan persentase (%) serta data yang dipergunakan adalah data enam provinsi di Daerah Jawa dari tahun 2015-2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Adapun hasil pengujian data penelitian dengan menggunakan program Eviews 10.

Penentuan Model

Tabel 4 Uji Hausman dan Uji Chow

Correlated Random Effects & Redundant Fixed Effects Tests			
Uji Hausman	Uji Chow		
Test Summary	Prob.	Effects Test	Prob
Cross-section random	0,0107	Period F	0,01
			88
		Period Chi-square	0,00
			39

Sumber : Hasil Olahan Eviews 10

Uji Hausman & Uji Chow

Uji hausman digunakan guna menetapkan model mana yang terbaik untuk digunakan antara REM dan FEM. Sedangkan uji *Chow* diperlukan

guna menetapkan model terbaik yang akan digunakan antara model FEM atau CEM. Berdasarkan uji hausman&uji chow pada table 3.1 dapat diketahui probabilitasnya dari kedua uji lebih kecil daripada $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dengan masing-masing nilainya sebesar 0,0107 dan 0,0039. Sehingga dapat diputuskan bahwa model yang dipilih dalam penelitian ini yaitu *fixed effect model* atau FEM.

Penelitian ini tidak melakukan uji Lagrange Multiplier (LM) atau uji yang diperlukan guna menetapkan model terbaik yang akan digunakan antara model REM atau CEM (OLS), karena Uji Hausman&Uji Chow dalam penelitian ini sudah menunjukkan bahwa FEM menjadi model yang paling tepat untuk digunakan.

Pendekatan FEM

Tabel 5 FEM

Hasil Regresi	Variabel			
	C	PENDIDIKAN	UMR	DR
Coefficient	143,73 27	4,37E-06	- 0,2716 44	0,9373 99
t-statistic	6,6797 70	3,017459	- 1,0578 83	3,2979 96
Prob.	0,0000	0,0063	0,3016	0,0033
R-squared	0,6554 49			
Prob.F-statistik	0,0005 49			
Durbin-Watson stat	0,9415 22			

Sumber : Hasil Olahan Eviews 10

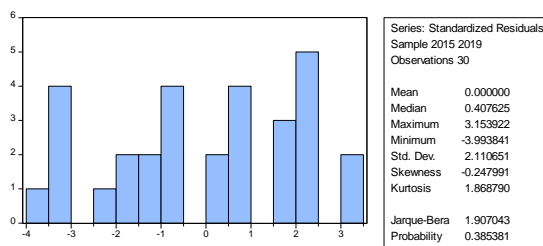
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah diagram batang yang tercipta dari data sesuai dengan kurva distribusi normal. Nilai yang digunakan dalam uji normalitas adalah nilai Jarque Bera dan

probabilitasnya. Residual dalam uji ini dapat dikatakan didistribusikan secara normal apabila nilai dari probabilitasnya lebih besar dari α 0,05.

Gambar 3.1 Uji Jarque-Bera



Sumber : Hasil Olahan Eviews 10

Berdasarkan uji statistic Jarque-Bera, nilai statistiknya sebesar 1,104387 maka dapat dinyatakan bahwa residual didistribusikan secara normal atau dapat dilihat dari nilai Probabilitasnya yaitu 0,385381 yang lebih besar dari 0,05 ($0,385381 > 0,05$).

Uji Autokorelasi

Uji ini diperlukan guna melihat ada tidaknya hubungan data saat ini dengan data sebelumnya apabila data yang digunakan data time series. Nilai yang diperlukan untuk uji autokorelasi adalah nilai *OBS*R-square* lurus sampai nilai *Prob.Chi-square* (2). Dikatakan terjadi autokorelasi bila nilai probabilitas dari *OBS*R-square* kurang dari 5% atau 0,05.

Berdasarkan table 3.2, dapat dilihat dengan membandingkan nilai statistic *Durbin Watson*. Dalam perhitungan FEM nilai dari nilai Durbin Watson sebesar 0,941522 yang lebih besar dari α 5% atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan model tidak mengandung autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini diperlukan guna melihat ada atau

tidaknya variansi dalam data. Yang diinginkan tidak ada heteroskedastisitas dalam data, Nilai yang dilihat adalah nilai dari masing-masing probabilitas variabel independennya. Dikatakan terjadi heteroskedastisitas bila nilai probabilitas masing-masing variabel independennya kurang dari 5% atau 0,05.

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas

Hasil Regresi	Variabel			
	C	PENDIDIKA N	UMR	DR
Prob.	0,30 58	0,7976	0,348 8	0,269 5

Sumber : Hasil Olahan Eviews 10

Dari hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 3.3 diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada masing-masing variabel independen. Dimana masing-masing variabel yang digunakan memiliki nilai probabilitas di atas 5% (0,05).

Evaluasi Regresi

Koefisien Determinasi R-squared (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) diperlukan guna mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen (X) dalam model regresi dalam menjelaskan variable dependen (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable lain diluar model. Berdasarkan table 3.2 dapat dilihat nilai R-squared sebesar 0,655449 atau sebesar 65,54%, yang berarti kemampuan variable independen dalam menjelaskan variable dependen yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 65,54% sedangkan sisanya 34,46% dijelaskan oleh variable lain yang tidak digunakan dalam model regresi penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t statistic merupakan uji yang digunakan untuk melihat bagaimana besaran pengaruh dari pada tiap-tiap variabel X yang digunakan terhadap variabel Y yang ada, untuk membuktikan bahwa koefisien regresi ini secara statistic berpengaruh signifikan.

$$Df = n - k$$

$$= 30 - 4$$

$$= 26$$

Berdasarkan t table maka nilai kritis yang diperoleh dengan $df = 26$ dan $\alpha = 1\%$ adalah 2,778715. Maka berdasarkan table 3.2 hasil analisis uji t statistic dengan menggunakan program Eviews 10 dapat dilihat, sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendidikan terhadap TPAK

Dengan nilai t hitungnya 3,017459 dan nilai probabilitasnya 0,0063, maka variabel pendidikan memiliki pengaruh positif yang signifikan dengan TPAK di Daerah Jawa pada tahun 2015-2019.

2. Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap TPAK

Dengan nilai t hitungnya -1,057883 dan nilai probabilitasnya 0,3016, maka variabel upah minimum regional memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan dengan TPAK di Daerah Jawa pada tahun 2015-2019.

3. Pengaruh Rasio Ketergantungan terhadap TPAK

Dengan nilai t hitungnya 3,297996 dan nilai probabilitasnya 0,0033, maka variabel rasio ketergantungan memiliki pengaruh positif yang signifikan dengan TPAK di Daerah Jawa pada tahun 2015-2019.

Uji Simultan

Uji ini diperlukan untuk melihat signifikan

atau tidak signifikan antara variable independen dan variable dependen secara menyeluruh. Nilai yang dilihat adalah nilai F-Statistik dan prob (F-Statistik) pada hasil uji regresi. Uji F memiliki 2 cara pembacaan:

Simultansi: bila hasil goodness of fit menyatakan signifikan maka variabel independen tersebut secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yang kita miliki (pemakluman)

Goodness of fit (kelayakan model): dikatakan model layak bila nilai prob(F-Statistik) pada hasil uji regresi lebih kecil dari α (alfa) 1%, 5%, 10%

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ (Seluruh variable independen tidak berpengaruh terhadap variable dependen)

H_1 : Paling tidak ada satu $\beta_0 \neq 0$ (Paling tidak ada satu variable dependen berpengaruh terhadap variable dependen)

Perhitungan F table

Nilai F table adalah

$$Df 1 = N1 = k - 1 = 4 - 1 = 3$$

$$Df 2 = N2 = n - k = 30 - 4 = 26$$

Maka pada $\alpha = 1\%$, $df 1 = 3$ dan $df 2 = 26$, nilai f table sebesar 4,63657. Akan dikatakan signifikan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$. dapat disimpulkan bahwa variable Pendidikan (X1), Upah Minimum Regional (X2), dan Rasio Ketergantungan (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Y) dengan perolehan f hitung 5,978757 lebih besar dari f table 4,63657.

Uji Simultansi

Prob. < α

0,000549 < 0,01 variabel X1, X2, dan X3 secara simultan mempengaruhi Y atau Pendidikan, Upah Minimum Regional, dan Rasio

Ketergantungan bersama-sama secara simultan mempengaruhi TPAK.

GOF (Goodness of Fit)

Dengan nilai uji F signifikan pada $\alpha = 1\%$, maka model regresi layak digunakan untuk memprediksi variable Y (TPAK).

Persamaan Akhir

$$\begin{aligned} TPAK_{it} &= \beta_0 + \beta_1 Pendidikan_{it} + \beta_2 UMR_{it} \\ &\quad + \beta_3 DR_{it} + \varepsilon_{it} \\ TPAK_{it} &= 143,7327 + 4,37E \\ &\quad - 06 Pendidikan_{it} \\ &\quad - 0,271644 UMR_{it} \\ &\quad + 0.937399 DR_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

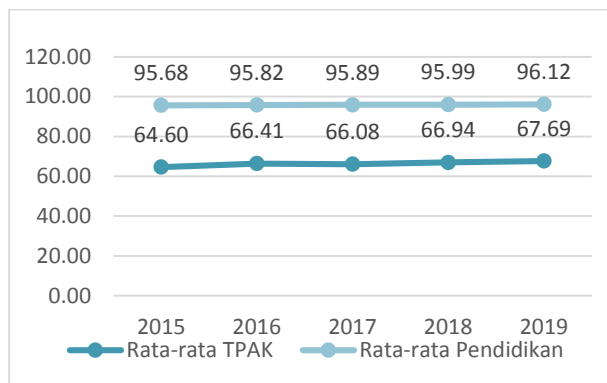
Analisis Pengujian

Penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh dari variable independen yang terdiri atas Pendidikan, Upah Minimum Regional, dan Rasio Ketergantungan terhadap TPAK di Daerah Jawa. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menganalisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan aplikasi Eviews 10. Pembahasan secara lebih rinci mengenai pengaruh variable Pendidikan (X1), Upah Minimum Regional (X2), dan Rasio Ketergantungan (X3) terhadap TPAK (Y) di Daerah Jawa, adalah sebagai berikut:

Pengaruh Pendidikan terhadap TPAK

Berdasarkan nilai t hitungnya 3,017459 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0063, maka variabel pendidikan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap TPAK di Daerah Jawa pada tahun 2015-2019. Hal ini berarti setiap ada peningkatan 1% pendidikan maka akan meningkatkan TPAK di Daerah Jawa pada tahun 2015-2019 sebesar nilai koefisiennya yaitu

0,00000437%.



Gambar 3 Rata-rata TPAK dan Pendidikan di Pulau Jawa tahun 2015-2019 (%)

Sumber : BPS tahun 2015-2019 (diolah)

Pengaruh positif pada pendidikan terhadap TPAK di Daerah Jawa pada tahun 2015-2019 karena seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.2 pada tiap tahunnya pendidikan di Pulau Jawa pada tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dengan peningkatan pendidikan dapat dilihat bahwa rata-rata TPAK tiap tahunnya mengalami peningkatan pula. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang telah dituliskan oleh (Nurdin dkk ,2017) ia menyatakan dalam penelitiannya adanya hubungan positif yang signifikan antara pendidikan dan penawaran tenaga kerja wanita pada sector informal di Kota Jambi.

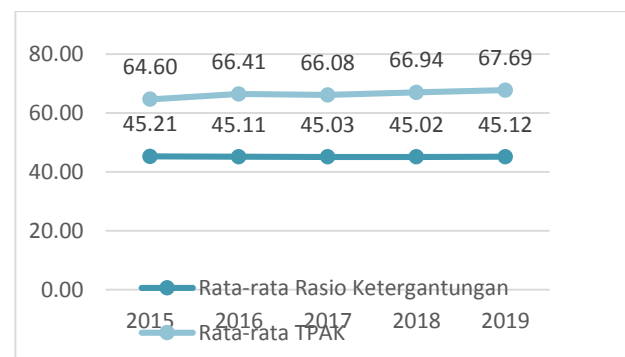
Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap TPAK

Berdasarkan nilai t hitung sebesar -1,057883 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,3016, maka variabel upah minimum regional mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap TPAK di Daerah Jawa pada tahun 2015-2019. Hal ini berarti setiap ada peningkatan 1% pendidikan maka akan menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Pulau Jawa pada tahun 2015-2019 sebesar nilai koefisiennya yaitu 0.271644%.

Upah dapat berpengaruh negative terhadap TPAK di Daerah Jawa pada tahun 2015-2019 hal ini berkaitan dengan teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Adam Smith, dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi kenaikan upah pada tingkat tertentu belum tentu akan menaikkan jumlah partisipasi angkatan kerja di suatu daerah. Hasil penelitian selaras dengan penelitian terdahulu yang telah dituliskan oleh (Triani & Andrisani, 2019) mengungkap bahwa ada hubungan negative dan tidak signifikan antara tingkat upah dengan penawaran tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2017. Meskipun upah tidak berpengaruh secara signifikan hal ini tetap harus di perhatikan oleh pemerintah.

Pengaruh Rasio Ketergantungan terhadap TPAK

Berdasarkan nilai t hitungnya 3,297996 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0033, maka variabel rasio ketergantungan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap TPAK di Daerah Jawa pada tahun 2015-2019. Hal ini berarti setiap ada peningkatan 1% pendidikan maka akan menaikkan TPAK di Daerah Jawa pada tahun 2015-2019 sebesar nilai koefisiennya yaitu 0,937399%.



Gambar 4 Rata-rata Rasio Ketergantungan dan TPAK di Pulau Jawa tahun 2015-2019 (%)

Sumber : BPS tahun 2015-2019 (diolah)

Rasio ketergantungan akan berpengaruh positif terhadap TPAK di Daerah Jawa pada tahun 2015-2019. Dari gambar 3.3 dapat dilihat angka rasio ketergantungan dan TPAK rata-rata tiap tahun mengalami peningkatan, dapat dilihat pula bahwa antara rasio ketergantungan dengan TPAK selalu bergerak bersamaan contohnya pada tahun 2017 rasio ketergantungan mengalami penurunan menjadi 45,03% begitu pula dengan TPAK mengalami penurunan menjadi 66,08%. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang telah dituliskan oleh (Rahmita Handayani et al., 2020) dalam penelitiannya mengungkap bahwa banyaknya tanggungan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pekerja perempuan bekerja di sector informal di Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah tertulis dalam penelitian yang berjudul “Analisa Determinasi TPAK di Jawa Tahun 2015-2019”, maka dapat dituliskan simpulan sebagai berikut:

1. Variabel pendidikan mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap TPAK di Daerah Jawa tahun 2015-2019.
2. Variabel upah minimum regional mempunyai hubungan negatif yang tidak signifikan terhadap TPAK di Daerah Jawa tahun 2015-2019.
3. Variabel rasio ketergantungan mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap TPAK di Daerah Jawa tahun 2015-2019.

Saran

Dari hasil pembahasan serta kesimpulan yang telah tertulis diatas, maka saran yang dapat

dibagikan peneliti adalah untuk menaikkan tingkat partisipasi angkatan kerja pemerintah disarankan dalam menentukan tingkat upah minimum regional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal yaitu melihat kebutuhan hidup layak, tingkat pendidikan tenaga kerja, dan jumlah angkatan kerja yang ada. Pemerintah diharapkan kedepannya lebih bijaksana dalam mengelola dana pendidikan mengingat bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, J., & Fedryansyah, M. (2018). Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Asean Economy Community. *Jurnal Pekerjaan Sosial, 1*(2), 77–86. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i2.18261>
- Mantra, Ida Bagoes. 2015. Demografi Umum Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Michael Todaro . Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. (Jakarta: Erlangga 2000)
- Todaro, M. P & Smith, S. SC. 2006. Pembangunan Ekonomi Edisi Sembilan Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan, Edisi ke -2, Kencana Prenada Media Group, Indonesia.
- Widarjono, A. (2017). *Model Regresi Data Panel. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN. *1*(2), 77.
- Hidayat, M., Hadi, M. F., & Sutrisno, S. (2017). Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Perempuan Antar Kabupaten

- Di Provinsi Riau. *Media Trend*, 12(1), 76–89.
<https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i1.2541>
- Ismail, Z. (2018). *Teori Ekonomi Solow*.
- Menajang, H. (2019). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 16(4).
<https://doi.org/10.35794/jpekd.23425.16.4.2014>
- NO.20, 2003 UU RI. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum*, 6.
- Purwanti, E., & Rohayati, E. (2014). Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga, Pendapatan Terhadap Partisipasi Kerja Tenaga Kerja Wanita Pada Industri Kerupuk Kedelai Di Tuntang, Kab Semarang. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7(1), 113–123.
<https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/102>
- Saputri, H., & Destiningsih, R. (2020). Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Di Kabupaten Magelang. *Jurnal EKOMBIS*, 6(2), 131–141.
- Sarsi, W., Putro, T. S., & Sari, L. (2014). Pengaruh Tingkat Upah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Provinsi Riau. *Jurnal Fekon*, 1(2), 1–15.
- Triani, M., & Andrisani, E. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Upah Terhadap Penawaran Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Geografi*, 8(1), 49.
<https://doi.org/10.24036/geografi/vol8-iss1/568>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Undang-Undang*, 1, 1–34.
- Nurdin, Idra Wiarta, & Renny. (2017). Analisis Penawaran Tenaga Kerja Wanita Pada Sektor Informal di Kota Jambi. *ECONOMICA*, 53(4), 130.
- Tanjung, Hasrudin. (2015). *Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan*. 15(01), 2015.
<http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>
- Simanjuntak, Payaman J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: LP – FE, UI